

**Judul** : Platform digital wajib atasi deepfake, jaga ruang digital dari hoaks dan konten negatif  
**Tanggal** : Sabtu, 13 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Platform Digital Wajib Atasi Deepfake

# Jaga Ruang Digital Dari Hoaks Dan Konten Negatif

Senayan menyoroti maraknya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence/ AI*. Video seolah-olah asli itu banyak berseliweran di media sosial.

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun meminta platform digital menghadirkan fitur pelacakan. Agar, konten *deepfake* atau video palsu tersebut mudah dikenali.

Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengatakan, teknologi AI ini memang inovasi luar biasa. "Tapi juga membuka ruang manipulasi informasi yang berbahaya jika tidak dikenali," ujar Deng Ical sapaan akrabnya, Jumat (12/9/2025).

Semua pihak, kata Deng Ical, tidak bisa menutup mata terhadap fenomena *deepfake* yang semakin canggih. Foto, video, bahkan suara bisa direkayasa sedemikian rupa hingga sulit dibedakan dari yang asli.

"Tanpa ada fitur pengecekan, masyarakat akan semakin kesulitan membedakan kebenaran dan kebohongan di ruang digital," ujar Deng Ical.

Menurut Deng Ical platform digital global memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan keamanan serta

kepercayaan publik terhadap konten yang beredar. Fitur khusus yang dapat menandai konten buatan AI diyakini mampu menjadi solusi preventif agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi palsu.

Dengan adanya fitur pengecekan, kata dia, publik bisa dengan cepat mengetahui mana konten yang benar-benar otentik, dan mana yang palsu atau hasil rekayasa AI. "Ini penting untuk menjaga literasi digital sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan teknologi," tegasnya.

Komisi I DPR akan memberikan perhatian serius terhadap inisiatif Komdigi ini. Langkah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat bersama kementerian terkait guna merumuskan kebijakan yang komprehensif dan aplikatif.

"Kami akan memastikan ada regulasi dan kerja sama yang kuat antara Pemerintah, DPR, dan platform digital, agar ruang digital tetap sehat, aman, dan



Syamsu Rizal

kredibel," tandas politikus PKB ini.

Selain aspek teknis, upaya pengendalian konten AI juga harus dibarengi dengan peningkatan edukasi literasi digital. Sebab masyarakat perlu dibekali kemampuan kritis agar tidak mudah termakan hoaks atau manipulasi digital.

"Kebijakan teknis saja tidak cukup. Edukasi publik dan literasi digital harus diperkuat. Bila masyarakat kritis dan mele-

digital, maka potensi dampak buruk AI bisa diminimalisasi," kata legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I tersebut.

Selain itu, perlu ada percepatan literasi, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan menjadi gate keeper atau penjaga untuk menjaring informasi yang dibutuhkan. Sebab pengawasan aktivitas di ruang digital sangat dibutuhkan. "Pemerintah juga harus segera membentuk Dewan Pengawas sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)," kata dia.

Sementara, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, meminta platform digital ikut membantu masyarakat menangkal hoaks dan *deepfake*. Berdasarkan data dari Sensity AI mencatat, setidaknya terjadi peningkatan 550 persen konten *deepfake* dalam lima tahun terakhir.

"Saya yakin jumlahnya jauh lebih besar karena kemampuan aplikasi untuk membuat video atau foto *deepfake* kini sangat masif," kata Nezar dalam keterangannya, Kamis, (11/9/2025).

Nezar meyakini, semua platform digital memiliki teknologi komputasi dan algoritma yang

bisa dimanfaatkan untuk memfilter konten-konten yang dibuat oleh AI.

"Bila kita meragukan isi konten, bisa dicek dengan kekuatan komputasi dan AI yang mereka punya. Seperti di Meta atau Google, fitur seperti ini bisa jadi bagian layanan standar," kata dia.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan sebagai alat pembuat konten hoaks. Terlebih, Indonesia sudah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), dan sejumlah peraturan teknis.

Saat ini, kata dia, Pemerintah juga menyiapkan regulasi khusus pemanfaatan AI yang etis, bermakna, dan bertanggung jawab. "Ruang digital ini milik kita bersama, maka kita perlu kerja sama yang erat untuk menjaga publik dari hoaks dan konten negatif," tutup Nezar. ■ TIF